

Kebijakan Kepala Dalam Meningkatkan Kualitas Aparatur Desa

Diajukan untuk memenuhi persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana
Administrasi Publik



OLEH :

FENI LANDUTANA

2019210024

**KONSENTRASI KEBIJAKAN PUBLIK
PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK
UNIVERSITAS TRIBHUWANA TUNGGADDEWI
MALANG
2023**

Ringkasan

Aparatur memiliki tokoh kepercayaan yang dipercaya untuk mewujudkan tuntutan oleh hak masyarakat pedesaan salah satunya mengenai kinerja perangkat desa khususnya di desa pandanrejo. Bumiaji, kota batu (dua) faktor pendukung dan faktor penghambat kebijakan kepala desa dalam meningkatkan kinerja perangkat desa di desa pandandanrejo, kecamatan bumi aji, kota batu. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif. Fokus penelitian adalah (1) memberikan motivasi kerja (2) komunikasi (tiga) pembangunan, kinerja pemerintah yang menjadi informan adalah kepala desa pandanrejo, sekretaris pandanrejo, bagian pemerintahan pandanrejo.

Kata Kunci: Kinerja Perangkat Desa

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Ubahan yg menjadi harapan bagi bangsa Indonesia untuk perbaiki hidup dan meningkatkan potensi diri dalam berbagai aspek kehidupan.

Dalam penjelasan luas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang disebutkan bahwa daerah provinsi adalah daerah otonom berkedudukan Alaihi Salam AS sekaligus daerah administratif Alaihi Salam. melayani.

Sudah menjadi hal yang wajar bahwa salah satu penyebab utama pelayanan publik yang prima adalah kepemimpinan yang solid dan tegas. Dengan adanya pemimpin yang memiliki keterampilan dan prasyarat lain yang mempengaruhi kualitas kepemimpinan, pelayanan publik bersifat otomatis, baik pada birokrasi berskala besar di tingkat nasional maupun yang kecil di tingkat nasional.

Aparatur kinerja yang dijalankan sangat meningkat, hakikat kepemimpinan yang utama adalah rangkaian kesatuan insan yang terdiri dari alam. Kemampuan, proses, dan konsep yang baik dalam diri seseorang kemudian diikuti dan dipatuhi oleh orang lain sehingga dapat dikatakan bahwa kepemimpinan adalah proses mempengaruhi orang atau kelompok lain (Nurdin 2016:89).

Menghadirkan carrier yang akurat ke dalam jaringan diprediksi akan lebih responsif terhadap tuntutan jaringan itu sendiri, dimana paradigma community provider sudah berjalan. sebagai pemegang kekuasaan di tingkat paling bawah, kepala desa memiliki fungsi yang sangat vital dalam memimpin dan mengarahkan perangkat desa dan masyarakat ke arah keberhasilan pembangunan baik secara moril maupun materil. Peran pelopor sangat penting dalam era oposisi globalisasi kontemporer. dan fitur tekad untuk bekerja dengan benar. oleh karena itu, seorang pelopor diperlukan untuk menjadi ahli dan menguasai lukisannya dengan baik sesuai dengan kode etik profesionalnya seperti kepala lainnya untuk mencapai keinginannya.

Dan impian organisasi dapat dimaksimalkan dan mendorong personel sehingga diharapkan dapat memberikan produktivitas yang berlebihan (Husain, 2017: 145) Gagasan pemberdayaan pemerintah desa dapat diimplementasikan melalui aplikasi tuk meningkatkan keunggulan atau kemampuan aparatur pemerintah daerah set4. Dlm tersebut krusial dalam pergaulan di kalangan pelayanan publik. dan manajemen, seolah-olah ada mata yang sulit dipisahkan. saling memberi tahu. Bukan hal yang aneh bahwa layanan publik yang luar biasa

adalah salah satu faktor penyebab utama, dengan kepemimpinan yang kuat di hadapan para pemimpin yang memiliki pengetahuan dan kebutuhan lain yang mempengaruhi manajemen kelas satu, sehingga layanan publik diotomatisasi, baik di Tingkat birokrasi, wabah peringatan nasional skala besar serta yang terkecil di pemerintahan desa, akan berlalu dengan baik. Untuk memahami kebutuhan dan hak jaringan desa, salah satunya mengenai kinerja perangkat desa secara keseluruhan, khususnya di desa Pandanrejo, seorang kepala desa seharusnya memiliki potensi untuk mendorong dan meningkatkan kinerja perangkat desa dan memimpin seluruh perangkat desa.

Melaksanakan kewajiban dan tugas perangkat Desa sendiri agar dapat diketahui apa yang diharapkan masyarakat dan upaya yang dilakukan dengan bantuan kepala Desa dalam meningkatkan kinerja perangkat Desa secara keseluruhan sudah sesuai tetapi jauh masih ditemukan beberapa perangkat Desa yang belum maksimal dalam melaksanakan kewajibannya hal ini terlihat dari terbatasnya sumber daya manusia, hilangnya musyawarah dan tidak adanya kedisiplinan pekerja dimana masih banyak pegawai yang tidak disiplin waktu (Wahyudi, 2022: 39). Kepala Desa adalah seorang perangkat desa yang dipilih sekaligus oleh dan dari warga Desa yang merupakan warga negara Republik Indonesia yang selain syarat dan tata cara pemilihannya diatur melalui kebijakan daerah yang dapat berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. (satu) suku berikutnya ((Razak 2021:369) Kesatuan masyarakat adalah satuan pemasyarakatan yang memiliki kendala wilayah yang sah untuk menyesuaikan dan mengelola kegemaran masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang dapat dianut dan dijunjung tinggi dalam sistem kepresidenan Negara Kesatuan Republik. Indonesia. Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, memiliki konsekuensi logis terhadap kewajiban dan kemampuan utama lembaga pemerintah daerah dan kritis.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, dapat dilihat bahwa nilai-nilai norma ada di dalam bagian kebijakan otoritas.

Apa saja unsur pendukung dan unsur penghambat cakupan kepala desa dalam meningkatkan kinerja perangkat desa?

1.3. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana cakupan kepala desa dalam meningkatkan kinerja perangkat desa.

2. Untuk mengetahui faktor dan unsur penghambat pedoman kepala desa dalam meningkatkan kinerja perangkat desa.

1.4. Fungsi Studi

Terselenggaranya penelitian tentang “Kebijakan Kepala Desa dalam Meningkatkan Kinerja Perangkat Desa di Desa Pandanrejo Kecamatan Bumi Aji Kota Batu, khususnya :

1. Fungsi Teoritis

- a. Sebagai pedoman untuk mendapatkan pengalaman kerja yang relevan serta bagaimana beradaptasi dengan baik dalam menghadapi lingkungan lukisan sebelum terjun ke dunia nyata.
- b. Dapat menambah pengetahuan sebagai hasil studi dan dapat menguasai disiplin ilmu yang diperoleh

2. Fungsi Yang Realistis

- a. Sebagai pedoman penguasaan tentang masalah-masalah yang terjadi di dunia perburuhan, dan kenyamanan.
- b. berusaha mencari cara untuk mempertimbangkan dan memberikan sumbangsih pikiran yang bermanfaat berdasarkan pemahaman yang diperoleh di perguruan tinggi di Desa Pandanrejo upaya meningkatkan cakupan kepala Desa dalam meningkatkan kinerja kepala Desa.

REFERENCES

Jurnal

- Alfian, Yani et al. 2019. Peran Kepala Desa Dalam Meningkatkan Kinerja Aparat Desa Di Desa Sangkanhurip Kecamatan Katapang Kabupaten Bandung. : 48.
- Andri Wahyudi. 1979. Kinerja Aparatur Pemerintah Desa Dalam Pelaksanaan Pelayanan Publik Kepada Masyarakat Performance Of Village Government Apparatus In The Implementation Of Public Services To The Community.15(01): 38–48.
- Andi A bdul Razak Ishak, and Hasniati Zainal. 2021Pengaruh Kompetensi dan Promosi Jabatan terhadap Kinerja Karyawan. SEIKO: Journal of Management & Business 4.1: 362-373.
- Afandi. 2018. Manajemen Sumber Daya Manusia (Teori, Konsep dan Indikator). Nusa Media. Yogyakarta.
- Ajang Marselinus 2015 Kinerja Aparatur Desa Di Desa Ujoh Bilang.
- Budi Setiawati, and Susiani Susiani. 2018 Peran Kepala Desa Sebagai Motivator Dalam Meningkatkan Kinerja Aparat Di Kantor Desa Halangan Kecamatan Pugaan Kabupaten Tabalong.JAPB 1.2 : 674-692.
- Bachtiar Husain. Mei 2018. Pengaruh Disiplin Kerja terhadap Kinerja Karyawan (Pada Pt. Bank Danamon Tbk Cabang Bintaro),
- Henti, Widasari 2021 E-Service Quality Dalam Meningkatkan Pelayanan Publik Di Kecamatan Kiaracandong Kota Bandung. 2022.
- Huzain, Hasriany . 2021. Pengelolaan Sumber Daya Manusia. Pengelolaan Sumber Daya Manusia.
- Husain, Bachtiar Arifudin. 2017. Pengaruh Disiplin Kerja Terhadap Kinerja Karyawan (Pada Pt. Bank Danamon Tbk Cabang Bintaro). JENIUS (Jurnal Ilmiah Manajemen Sumber Daya Manusia) 1(1).
- Kurnianto, dkk. 2018. Kepemimpinan transformasional pada perilakuKewargaan organisasi dan komitmen afektif. Jurnal Manajemen dan Pemasaran Jasa, 11.2: 217-232.
- Marselinus,Ajang.2015. Peran Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Meningkatkan Kinerja Aparatur Desa Di Desa Ujoh Bilang.

- Muh Firyal. 2015, Peran Kepala Desa Dalam Meningkatkan Kinerja Aparat Desa Mopuya Kecamatan Bulawa Kabupaten Bone Bolango. Publik (Jurnal Ilmu Administrasi), 4.1: 49-52.
- Moleong, Lexy J. 2018. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT Rosdakarya.
- Nurdin, Sahidillah, and Acep Rohendi. "Gaya kepemimpinan transformasional, budaya organisasi, dan kinerja karyawan dengan mediasi komitmen organisasi." Jurnal Ecodemica Jurnal Ekonomi Manajemen dan Bisnis 4.1
- Razak, Razman. B. 2018. Peranan Kepala Desa Dalam Meningkatkan Kinerja Aparatur Perangkat Desa. Jurnal Edukasi Nonformal, 2(1), 367-379.
- Rudiah, R. B. 2018. Peran Kepala Desa Sebagai Motivator Dalam Meningkatkan Kinerja Aparat Di Kantor Desa Halangan. JAPB 1.2 2018: 674-692.
- Rachmat, Basuki. 2020. Peran Kepala Desa Dalam Meningkatkan Kinerja Aparatur Bidang Pengelolaan Dana Desa Di Desa Lebakbarang Kecamatan Lebakbarang Kabupaten Pekalongan Provinsi Jawa Tengah. Jurnal MSDA (Manajemen Sumber Daya Aparatur) 7(2): 127-46.
- Rahardiansah, Trubus. 2017 Analisis Penegakan Disiplin Aparatur Sipil Negara (Studi Kasus Kedeputusan Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)). Civil Service 11.1 77-93.
- TANJUNG, Hasrudy. 2017 Pengaruh Disiplin Kerja Dan Motivasi Kerja Terhadap Prestasi Kerja Pegawai Pada Dinas Sosial Dan Tenaga Kerja Kota Medan. Jurnal Ilmiah Manajemen Dan Bisnis, 15.1
- Widasari, Henty. 2022. E-Service Quality Dalam Meningkatkan Pelayanan Publik Di Kecamatan Kiaracondong Kota Bandung. Huzain, H. 2021. Pengelolaan Sumber Daya Manusia. Pengelolaan Sumber Daya Manusia.
- Wahyudi, Andri. 2022. Kinerja Aparatur Pemerintah Desa Dalam Pelaksanaan Pelayanan Publik Kepada Masyarakat (Suatu Tinjauan Tingkat Pendidikan Aparatur Pemerintah Desa Ngadisuko Kecamatan Durenan Kabupaten Trenggalek). Publiciana, 15(01), 38-48. Jurnal Ecodemica Jurnal Ekonomi Manajemen dan Bisnis 4.1
- Wibisono, Panglipur Ilham Desla; Wangi, Maya Sekar Siswanta, Siswanta 2020. Gaya Komunikasi Kepemimpinan Kepala Desa Ngabeyan Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo. Solidaritas, , 4.2

- Widayati, Sri. "Analisis Pengawasan, Tunjangan Kinerja Dan Kehadiran Dalam Meningkatkan Kinerja Pegawai Selama Pandemi Covid-19." *Eqien-Jurnal Ekonomi dan Bisnis*
- Ayu Ningsih, s. r. i. (2021). *Pelaksanaan Pembinaan Masyarakat Di Desa Bilanrengi Kecamatan Parigi Kabupaten Gowa (Doctoral dissertation, Universitas Bosowa)*.
- Masengi, s. o., Pangemanan, S., & Kumayas, N. (2018). Koordinasi Camat Dalam Penyelenggaraan Ketertiban Umum Di Kecamatan Tompasso Baru Kabupaten Minahasa Selatan. *Jurnal EksekutiF*, 1(1).
- Nasution, Z., & IP, S. (1990). *Komunikasi Politik. Suatu Pengantar*, Ghalia Indonesia, Jakarta
- Susan, E. (2019). *Manajemen sumber daya manusia*. Adaara: *Jurnal Manajemen Pend*
- Syachrinaldy, Syachrinaldy. "Implementasi Kebijakan Program Peningkatan Kinerja Pegawai Pada Bidang Pemasaran Dinas Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Provinsi Sulawesi Tengah." *Katalogis*

Buku

- Dunn, William N. 2017. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Nugroho, Riant. 2006. *Kebijakan Publik Untuk Negara-Negara Berkembang: Model-Model Perumusan, Implementasi, dan Evaluasi*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo. *Pemasaran Jasa*, 11.2: 217-232.
- Moleong, Lexy J. 2018. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Rosdakarya.
- Setyawan Dody. 2017. *Pengantar Kebijakan Publik*. : *Intelegensia Media*.
- Sugiman, S. 2018. *Pemerintahan Desa*. *Binamulia Hukum*, 7(1), 82-95.
- Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung, Alfabeta.
- Sugiyono 2010. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabet

Sugiyono. 2020. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D. Bandung:

Alfabeta

Sugiyono. 2020. Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan R& D. Bandung:

Alfa Beta.

Undang-Undang

Undang-Undang No. 12 tahun 2011 Standar Pelayanan

Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Undang-Undang No 23 Tahun 2014 Otonomi Daerah

Peraturan Menteri Desa Nomor 4 Tahun 2015 Pengertian Desa